

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil terkait defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2020-2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perbandingan kesesuaian antara defisit yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT, maka diketahui:
 - a. Untuk kesesuaian dengan batas maksimal defisit APBD, maka defisit yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT telah melampaui batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan, dan
 - b. Untuk kesesuaian dengan batas maksimal kumulatif defisit APBD, defisit yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT tidak melampaui batas maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan.

Hal ini berarti defisit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2020-2022 sudah sesuai dengan batasan defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun 2020-2022 dilihat dari unsur APBD yaitu:

- a. Pendapatan yang dianggarkan baik dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja daerah
 - b. Banyaknya kebutuhan dan program kerja yang harus dibiayai untuk masing-masing tahun anggaran
 - c. Adanya kebijakan penerimaan pembiayaan pemerintah.
3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2020-2022 meliputi meningkatnya pinjaman daerah serta meningkatkan beban keuangan daerah sebagai lanjutan dari pinjaman daerah tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi NTT diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat serta juga bagi kebutuhan pembiayaan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi NTT diharapkan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi serta rasionalisasi belanja daerah sehingga belanja daerah tidak membebani anggaran daerah.